

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Adami Chazawi, S. 2014. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris, Ismail. 2020. *Merajut Hukum di Indonesia*.
- Armia, M. S. 2022. *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, A. 2015. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachmi. 2017. *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Inosentius Samsul, 2009, *Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. 2021. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Karjadi, M. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Kusumaatmadja, M. 2016. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2007. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Marpaung Leden. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Marzuki, P. M. 2015. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama

Rahardjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Mandar Maju.

Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thohari, A. (2004). *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

ARTIKEL DALAM JURNAL :

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2, (hlm 409-431).

- Anwar, K. (2020). , “sistem peradilan indonesia MK,MA dan KY”. *Jurnal Hukum*, Volume 40, (hlm.12-15).
- Ardiansyah, F. H., Alfitra, A., & Elda, T. (2021). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, Volume 2, (hlm. 289–306).
- Arfan Faiz Muhlizi, 2015, “Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali”, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari.
- Bahtiar. (2022). Pengertian Sistem Peradilan Nasional. *Jurnal Hukum*, Volume 12 ,(hlm.10-15).
- Bayangkara, B. A., Tehupeior, A., & Napitupulu, D. R. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI. *Action Research Literate*, Volume 5. (hlm 77-217)
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2015): 328-352.
- Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. 2023. “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (*Ongeschreven Recht*) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filosofis.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19(Alkostar 2011): (hlm. 71–84).
- Laming, Muhammad Tahir. 2021. “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja journal* 4(2): (hlm 78-269).
- Manalu, P. R. (2020). Hukum Acara Pidana dari segi pembelaan. Volume 10, (hlm 70-159).
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), (hlm.453-480).
- Muh. Djaelani Prasetya, 2014, “Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

(Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)”, Naskah Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Puteri Hikmawati, 2015, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari, h. 1-4.

Putri, Z. A. D. A., & Hartanto, S. H. (2019). *Kajian Yuridis Upaya Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Terhadap Asas Litis finiri oportet dalam Perkara Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Volume 10. (hlm 110-200).

Rawls, J. (2020). A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar. *Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 13.

Ristu Darmawan, (2012). Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana. *Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia*, 21.

Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), (hlm.61-71).

Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 21, (hlm.204-215).

Suhariyanto, B. (2022, Juli). Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, (hlm.207-340).

Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Perspektif* 16.4 (2019): (hlm. 214-226).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Mahkamah Konstitusi 34/Puu-XI/2013.

SEMA No. 7 Tahun 2014.

